

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Majid Mahmud Mathlub. (2005). *Panduan hukum keluarga sakinah*. Era Intermedia.
- al-Azizi, A. S. (n.d.). *Sakinah Mawaddah wa Rahmah: Tuntunan Lengkap Mengenal "Baiti Jannati" di dalam Rumah*. DIVA PRESS.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Bintania, A. (2012). *Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-Qadha*. RajaGrafindo Persada.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress.
- Happy Suanto. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?* VisiMedia.
- Hasbullah Bakry. (1978). *Kumpulan Lengkap Undang – Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Djambatan.
- Kadarudin. (2021). *PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM (Sebuah Pemahaman Awal)*. Formaci.
- Kumedi Ja'far. (2021). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Arjasa Pratama.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mesaraini. (2009). *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*. Pusat Studi dan Pengembang Pasantren.

- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Muhsin, M. (2022). *PERKAWINAN DI INDONESIA* (Vol. 2). AICOMS.
- Purnadi Purbacaraka, & Agus Brotosusilo. (1997). *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. Raja Grafindo Persada.
- Qutb, S. (2000). *Tafsir fi zhilalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran* (Issue v. 1). Gema Insani Press.
- Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Rokhman Saleh, N. (n.d.). *LAKTASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)*.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Susilo, A. B. (n.d.). *MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (The Meaning and Criteria of*

Discretion of Public Policy and/or Act of Public Officials in Good Governance Implementation).

Syahr, H. S. (1997). *Undang-undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum islam.*

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Kencana.

Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Kencana.

Tutik, T. T. (2006). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia.* Prestasi Pustaka.

Wahbah Zuhaili, Muhammad Afifi, & Abdul Hafiz. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i 3: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits / Wahbah Zuhaili.* Almahira.

W.J.S. Poewadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi III).* Balai Pustak.

Zainuddin Ali. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum.* Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Arliman, L., Sekolah, S., Ilmu, T., Padang, H., Gang, J., Baiturahman, M., 40, N., & Lintah, L. (2018). *PERAN LEMBAGA CATATAN SIPIL TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN **. 27.

Bastomi, H. (n.d.). *PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)*.

Budi Prasetyo. (2017). Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6(1), 135–142.

Djawas, M., & Nurzakia. (2018). Perkawinan campuran di Kota Sabang (Studi terhadap faktor dan persepsi masyarakat tentang dampak perkawinan campuran). *Samarah*, 2(2), 307–334.

Fauzi, R. (2018). *PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAK TERHADAP KEWARGANEGARAAN DAN STATUS ANAK MENURUT*

- UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. *Soumatra Law Review*, 1(1), 153.
- Firdaus, F. (2018). Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 233–243.
- Halilah, S., & Fakhrurrahman Arif, M. (n.d.). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id
- Helty, G., & Widarto, J. (n.d.). *JURNAL CINTA NUSANTARA AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA*.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57.
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). *LEGALITAS PENGUASAAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR (HADHANAH) KEPADA BAPAK PASCA PERCERAIAN*.
- Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 295–302.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Nomor 01. In *Jurnal Crepido* (Vol. 01).

Khair, U., Tinggi, S., Putri, I. H., & Payakumbuh, M. (2020). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum) PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN **.

Kurniasih, R. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF* (Vol. 12, Issue 1).

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Muhsin, M. (2022). *PERKAWINAN DI INDONESIA* (Vol. 2). AICOMS.

Rokhman Saleh, N. (n.d.). *LAKTASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)*.

Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), 139–146.

Susilo, A. B. (n.d.). *MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (The Meaning and Criteria of Discretion of Public Policy and/or Act of Public Officials in Good Governance Implementation)*.

Uin, R., Thaha, S., & Jambi, S. (2021). TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 1–12.

Widanarti, H. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK*.

Yani, I., & Arisa, D. (n.d.). JURNAL KAJIAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA Journal homepage: <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php> /KH PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 30–43.